



[Bappeda Aceh]
[ISSN: 0852-9124]
[Vol. 8 No.1, Juni 2017]
[0651-29713] | [0651-21440] | [timlitbang@gmail.com]

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan

Irwan Safwadi

Keunggulan Kompetitif Kabupaten Simeulue Berdasarkan Pendekatan *Shift Share* Modifikasi Estaban-Marquillas.

Khairul Aswadi

Analisis Transformasi Struktural Perekonomian Kabupaten Aceh Utara

Murtala

Determinant Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Cut Risya Varlitya

Pengaruh Pajak, Retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh.

Ruhmaini¹⁾, Syukriy Abdullah²⁾ dan Zuraida³⁾

Faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah.

Murtala¹⁾ dan Irham Iskandar²⁾

Analisis Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan menggunakan Metode *Vector Autoregressive*

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) ACEH 2017**

DETERMINANT JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

DETERMINANT AMOUNT OF POPULATION ON POVERTY LEVEL IN ACEH PROVINCE

Murtala

Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

e-mail: tala.murtala@gmail.com

Diterima: 5 April 2017; direvisi: 10 Mei 2017; diterbitkan: 1 Juni 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data time series periode 1980-2014 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Model yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk sebesar 27,3 persen dan sisanya sebesar 72,7 persen dipengaruhi oleh: investasi, pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia, dan inflasi. Jumlah penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Jumlah penduduk merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Oleh karenanya memperlambat pertumbuhan penduduk atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan meningkatnya penduduk di Provinsi Aceh menjadi salah satu alternatif dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Kata kunci : Kependudukan dan Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to learn the effect of population on the poverty rate in Aceh. The time series data between 1980 and 2014 retrieved from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Indonesia were used. Employing the simple linear regression analysis, the results of the study suggest that the population variable accounts for 27.3 percent of the poverty rate while investment, economic development, human resource and inflation are responsible for 72.7 percent of the total figure. Somewhat, the population negatively and significantly affects the poverty rate. As the population in Aceh grows, relaxing the population growth or improving the social welfare can be an alternative way to reduce the poverty rate.

Keywords: Population and Poverty

PENDAHULUAN

Saat ini penduduk dunia telah mencapai jumlah 6,3 miliar jiwa. Bank Dunia memprediksikan bahwa pada tahun 2030,

jumlah itu akan ditambah dengan 3 miliar, dimana 2 miliar dari penduduk tambahan ini berada di negara-negara yang penghasilan menengah per harinya di bawah 2 dolar.

Di negara-negarayang sudah maju pertumbuhan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan di negara-negara berkembang. Berbagai usaha internasional dilakukan untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk ini berkaitan dengan pertumbuhan kalangan muda yang semakin meningkat di negara-negara berkembang. Diantara faktor-faktor pentingnya ialah turunnya tingkat kematian karena adanya berbagai fasilitas kesehatan.

Negara-negara yang persentase jumlah penduduk usia mudanya relatif tinggi, tetap saja akan menghadapi masalah pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang.

Dampak yang dominandari pertumbuhan penduduk di berbagai negara, ialah munculnya masalah-masalah seperti meningkatnya jumlah pengangguran, rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan, musnahnya sumber-sumber alami, menyusutnya sumber-sumber air dan krisis bahan makanan. Negara-negara ini pasti akan menghadapi pula berbagai krisis seperti polusi lingkungan hidup, meningkatnya urbanisasi, berbagai ketimpangan sosial serta transmigrasi besar-besaran.

Kondisi kemiskinan yang semakin meningkat, mendorong pemerintah untuk menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu program dalam strategi pembangunan yang meliputi penyediaan kebutuhan dasar dan mendorong kegiatan usaha masyarakat. *Implimentasi* program ini akan lebih efektif dan tepat sasaran bila peran pemerintah daerah semakin meningkat (Jasmina, 2001), karena hanya pemerintah daerah yang mengetahui hal-hal yang dibutuhkan daerahnya.

Persoalan yang dapat memicu terjadinya tingkat kemiskinan adalah tingginya laju pertumbuhan jumlah

penduduk. Masalah kependudukan menjadi salah satu permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi yang di hadapi oleh setiap Negara sedang berkembang, dimana terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Periode 2009-2014

Thn	Jumlah		Tingkat Kemiskinan (%)
	Penduduk Provinsi Aceh (000)	Penduduk Miskin (000)	
2009	4.363,5	892,87	20,46
2010	4.494,4	861,85	19,18
2011	4.619,0	894,80	19,37
2012	4.715,1	909,04	19,28
2013	4.811,1	842,42	17,51
2014	4.906,8	881,26	17,96

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh dari tahun 2009 hingga tahun 2014 mengalami fluktuatif. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebesar 892,87 ribu jiwa menurun menjadi 861,85 ribu pada tahun 2010. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh sampai tahun 2014 menurun menjadi 881,26 ribu jiwa. menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi suatu perubahan baik dalam menghadapi persoalan sosial dalam masyarakat sehingga pemerintah harus terus serius dan fokus dalam menjalankan pembangunan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Permasalah kemiskinan menarik perhatian besar dari banyak kalangan, minat yang besar tersebut mencakup betapa luasnya masalah kemiskinan, definisi dan sebab-sebabnya ternyata teramat komplek dan pemecahannya pun tidak terlalu mudah, karena ada sekelompok anggota masyarakat yang tidak mempunyai peluang dan

kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.

Yahya (1997) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Hasibuan (2007), menyatakan kemiskinan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat

Faisal (2012) menjelaskan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial.

Secara umum definisi-definisi tentang kemiskinan di atas menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu.

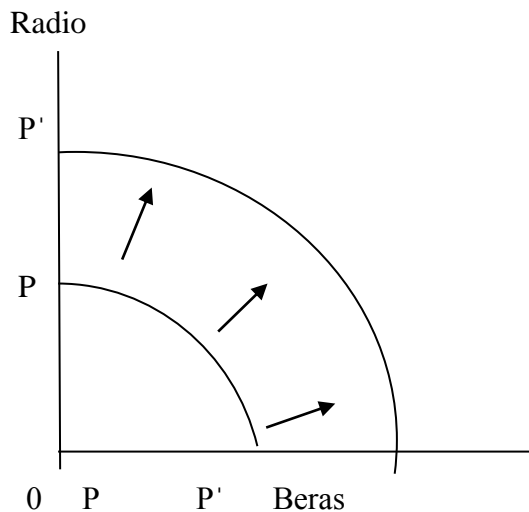
Mankiw (2005) dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Sukirno (2009) menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendak nya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

Sukirno (2008) menjelaskan bahwa masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik).

Yahya (1997) menyebutkan kemiskinan merupakan kondisi yang serba terbatas dan terjadi bukan ataskehendak orang yang bersangkutan. Penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, secara tradisional, dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik. Namun demikian, patut dipertanyakan apakah cepatnya pertumbuhan penawaran tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang yang mengalami kelebihan tenaga kerja akan memberikan efek positif atau negatif terhadap perkembangan ekonomi. Sebenarnya, hal tersebut tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan secara produktif mempekerjakan tambahan tenaga kerja tersebut.

Misalkan tanpa perubahan teknologi, kuantitas sumber daya manusia dan fisik meningkat dua kali lipat. Dalam Gambar 1 terlihat bahwa meningkatnya kuantitas sumber daya tersebut akan menggeser kurva kemungkinan produksi ke atas, dari $P - P$ ke $P' - P'$. ini berarti perekonomian tersebut sekarang dapat memproduksi lebih banyak radio dan beras (Todaro, 2004).



Gambar 1. Pergeseran kurva kemungkinan produksi yang disebabkan oleh kenaikan sumber daya manusia

Diasumsikan bahwa perekonomian tersebut hanya memproduksi dua jenis barang yaitu besar dan radio. Besarnya GNP (yakni jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang diproduksi) meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan kata lain, proses pertumbuhan ekonomi sedang berlangsung. Dari definisi tersebut maka dapatlah dibuat suatu batasan pengertian kemiskinan. Miskin diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang memiliki pekerjaan dan memiliki pendapatan namun pendapatannya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang paling dasar, tidak mencukupi atau mengalami kekurangan, baik secara material maupun non-material, disini dapat bermakna dalam ukuran relatif maupun absolut dan juga standar kebutuhan hidup itu berbeda-beda baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu diperlukan ukuran kemiskinan dalam upaya mengidentifikasi penduduk miskin.

Kemiskinan tidaklah merata di antara semua penduduk. Ada kelompok yang cenderung lebih miskin bila

dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kategori tingkat kemiskinan ini dapat diukur dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu. Sayogjo mengemukakan ukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan ukuran setara beras, ukuran kemiskinan tersebut berbeda antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan, sebagai berikut:

- Melarat : apabila konsumsi berasnya kurang dari 180 kg/jiwa/tahun (desa) dan ukuran dari 270 kg/jiwa/tahun (kota)
- Sangat miskin : bila konsumsi berasnya antara 240 kg/jiwa/tahun (desa) dan antara 360 kg/jiwa/tahun (kota)
- Miskin : bila konsumsi berasnya antara 320 kg/jiwa/tahun (desa) dan antara 480 kg/jiwa/tahun (kota) .

Menurut Ahmadi (2004), melakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum baik untuk makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis ini sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori/orang/hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya.

Penduduk miskin lebih banyak berada di daerah pedesaan dari pada di daerah perkotaan. Seperti diketahui bersama, pengangguran tersembunyi masih cukup banyak di daerah pedesaan. Mereka ini umumnya merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan/pengusaha tani dengan lahan sempit di desa, dan mereka merupakan pengusaha dengan modal minim dan akses kelembagaan keuangan formal sangat terbatas, terlalu minimnya pemilikan faktor-faktor

produksi di luar tenaga kerja oleh penduduk di desa ini mengakibatkan mereka sangat sulit untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

UNDP selain mengukur kemiskinan dengan parameter pendapatan pada tahun 1997 memperkenalkan apa yang disebut Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) (*Human Poverty Indeks-HPI*) atau biasa juga disebut Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks-HDI*), yakni bahwa kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivations*), yaitu kehidupan, pendidikan dan ketetapan ekonomi.

Martono dan Saidiharjo (1990) mengemukakan bahwa, penduduk adalah suatu kelompok organisme yang terdiri dari individu-individu yang mendiami suatu daerah dengan batas-batas tertentu.

Ahmadi (2004) menyebutkan penduduk adalah orang-orang yang berdiam atau tinggal pada suatu tempat tertentu, penduduk juga dikenal dengan istilah populasi yakni jumlah seluruh individu dan jenis atau species yang sama pada suatu tempat atau daerah bahwa :

“Kemelaratan itu disebabkan tidak adanya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertambahan bahan makanan, pertumbuhan penduduk bertambah menurut deret ukur yaitu 1, 2, 4, 8, 16. 32 dan seterusnya pertambahan makanan bertambah menurut deret hitung yaitu 1. 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya”.

Dari kutipan di atas terlihat bahwa semakin lama selisih antara jumlah penduduk dengan penyediaan bahan makanan akan jauh lebih besar. Hal ini akan terjadi berbagai akibat negatif dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang, karena dengan pertumbuhan penduduk jelas menurut penyediaan kebutuhan-kebutuhan hidup terutama bahan makanan.

Negara Republik Indonesia adalah

negara yang sedang berkembang maka selayaknyalah pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tujuan Negara Republik Indonesia dapat tercapai sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, secara tradisional, dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik. Namun demikian, patut dipertanyakan apakah cepatnya pertumbuhan penawaran tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang yang mengalami kelebihan tenaga kerja akan memberikan efek positif atau negatif terhadap perkembangan ekonomi. Sebenarnya, hal tersebut tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan secara produktif mempekerjakan tambahan tenaga kerja tersebut.

Dalam pengertian yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan cara penyelesaian tugas tradisional seperti menanam jagung, membuat pakaian, atau membangun rumah. Dalam hal ini, ada tiga klasifikasi dasar kemajuan teknologi, yaitu teknologi yang netral, yang hemat pekerja (*labor saving*) dan yang hemat modal (*capital saving*).

Kemajuan teknologi yang netral terjadi apabila penggunaan teknologi berhasil mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Inovasi yang sederhana, seperti pengelompokan tenaga kerja (semacam spesialisasi) dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat. Ditinjau dari sudut analisis kemungkinan produksi, perubahan teknologi yang netral, yang dapat

melipatgandakan output secara konsepsional, sama artinya dengan menggandakan semua input produktif..

Di pihak lain, kemajuan teknologi dapat berwujud hemat modal atau hemat pekerja (yakni output yang lebih tinggi dapat dicapai dengan menggunakan jumlah input pekerja dan modal yang sama). Penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, bor listrik berkecepatan tinggi, traktor dan lain-lain, dapat diklasifikasikan sebagai hemat pekerja.

Di negara-negara dunia ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka modal. Kemajuan teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang paling diperlukan. Kemajuan semacam ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien (yakni biaya yang lebih rendah) misalnya mesin pemotong rumput berputar atau mesin pengayak dengan tenaga tangan, pompa penghembus dengan tenaga kaki, dan penyemprot mekanis di atas punggung untuk pertanian skala kecil (Todaro, 2004).

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah keseimbangan dinamis antara kekuatan penambah dan kekuatan pengurang. Jumlah penduduk meningkat disebabkan oleh bertambahnya kelahiran. Tetapi secara bersamaan jumlah penduduk dikurangi oleh kematian orang-orang pada berbagai usia. Sementara situasi yang sama juga terjadi pada migrasi dimana migran masuk kedalam suatu kawasan atau daerah yang berarti menambah penduduk. Dengan kata lain pertumbuhan penduduk adalah perbandingan antara komponen utama yaitu fertilitas, mortalitas, migrasi masuk dan migrasi keluar (Bogoe, 2009 : 37).

Tingkat pertumbuhan penduduk di Negara berkembang umumnya lebih tinggi dari pada di negara maju, demikian juga tingkat pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan lebih tinggi dari pada di

daerah perkotaan. (Hasibuan, 2007 : 85). Akan tetapi masalah pertumbuhan penduduk bukan hanya sekedar masalah mengenai jumlahnya saja, namun juga menyangkut masalah kesejahteraan umat manusia dan perkembangan ekonomi (Todaro, 2004).

Thomas Robert malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur, sedangkan pertumbuhan makanan menurut deret hitung. Jadi dalam beberapa generasi akan terjadi kekurangan bahan makanan dan penduduk dunia akan mati kelaparan. Hukum malthus belum merupakan kenyataan sampai saat ini karena ia tidak memperhitungkan akan terjadinya *Check To Population*, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan (Hasibuan, 2007).

Jonaidi (2012), pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan begitu pula sebaliknya. Kurniawati (2014), variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah serta kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara.

Ismuningsih (2011), variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen (laju pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita yang disesuaikan, jumlah penduduk dan perbedaan karakteristik 34 kabupaten/kota) sebesar 95,94%, dan 4,06% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

Ismuningsih (2011) menyebutkan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan artinya semakin rendah pertumbuhan penduduk maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat melek huruf berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, artinya bahwa tingkat melek huruf tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Distribusi

Pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, artinya bahwa distribusi pendapatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Widyasworiano (2014) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dan partisipasi angkatan kerja wanita berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan sedangkan tingkat kesehatan berpengaruh namun tidak signifikan.

Imam (2010) menyebutkan pertumbuhan ekonomi, populasi dan angka melek huruf berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

Faisal (2012) menyebutkan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin sedangkan variabel kesehatan berpengaruh tetapi tidak signifikan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh, ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya terhadap variabel jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan selama periode 1980-2014. Data yang digunakan adalah data *time series* mencakup variabel jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan.

Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh digunakan fungsi kemiskinan yaitu sebagai berikut:

$$K = f(P)$$

Dimana :

K = Kemiskinan

I = Investasi

P = Jumlah penduduk

Kemudian dari model diatas diformulasikan kedalam model regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut :

$$K = a + b_1 \ln P + et$$

di mana:

K = Kemiskinan

a = Intercept

b₂ = Koefisien regresi jumlah penduduk

P = Jumlah penduduk

et = Error Terms

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh investasi, jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh maka dilakukan perhitungan diperoleh hasil akhir sebagai berikut :

Tabel 2

Hasil Perhitungan Regresi

Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B		
(Constant)	8,280	5,941	0,000
Jumlah penduduk	-0,629	-3,714	0,001
R	R Square	Adjusted R Square	F Change
0,543	0,295	0,273	13,739

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017)

Hasil penelitian diperoleh koefisien determinan adjusted (R²) sebesar 0,273 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk sebesar 27,3 persen dan sisanya sebesar 72,7 persen dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Persamaan akhir estimasi yaitu K = 8,280 - 0,629P. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 8,280 artinya apabila jumlah penduduk dianggap konstan maka tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh hanya sebesar 8,280 persen.

Koefisien estimasi jumlah penduduk sebesar -0,629 artinya setiap terjadinya perubahan sebesar 1 persen jumlah penduduk maka akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kemiskinan

sebesar 0,629 persen dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hal ini memberikan indikasi bahwa karena kondisi sumber daya manusianya semakin baik maka setiap terjadinya peningkatan jumlah penduduk kecenderungan untuk menurunnya tingkat kemiskinan semakin besar.

Hasil ini tidak sesuai dengan konsep atau pendapat Thomas Robert Malthus yang mengemukakan bahwa pertambahan penduduk menurut deret ukur, sedangkan pertambahan makanan menurut deret hitung. Jadi dalam beberapa generasi akan terjadi kekurangan bahan makanan dan penduduk dunia akan mati kelaparan. Hukum Malthus belum merupakan kenyataan sampai saat ini karena ia tidak memperhitungkan akan terjadinya *Check To Population*, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan (Hasibuan, 2007).

Untuk variabel jumlah penduduk diperoleh t-hitung sebesar 3,714 dengan nilai probabilitas sebesar 0,001, artinya secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil pengujian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismuningsih (2011) yang menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk. Kemudian juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismuningsih (2011) yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh jumlah penduduk sebesar 27,3 persen dan sisanya sebesar 72,7 persen dipengaruhi oleh: investasi, pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia, dan inflasi. Jumlah penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. 2004. Kependudukan di Indonesia dan Berbagai Aspeknya. Liberty. Yogyakarta.
- Bogue, D.J. 2009. Principle of Demography. JhonWiley& Sons, Inc. USA.
- Faisal, H. 2012. Pengaruh tingkat pendidikan dan kesehatan Terhadap produktivitas dan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat. JMPK. 8(3): 26-37.
- Hasibuan, M.S.P 2007. Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Indonesia .Armico. Bandung.
- Imam T. T. 2010. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, populasi, pendidikan, dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/ Kota Propinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2008. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ismuningsih, A. 2011. Faktor pertumbuhan penduduk, tingkat melek huruf, dan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004 – 2009. J. Ekonomi Pembangunan. 3 (2): 14-21.
- Jasmina. 2001. Masalah Kependudukan. Erlangga. Jakarta.
- Jonaidi, A. 2012. Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol 3, No 1: 46-52.
- Kurniawati, D. S, A. Kumenaung, D. Rotinsulu. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan Di

- Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 14. No 2: 26-36.
- Mankiw, N. G. 2000. Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat (alih bahasa: I. Nurmawan). Erlangga. Jakarta.
- Martono dan Saidiharjo. 1990. Geografi dan Kependudukan. Haji Masagung. Jakarta.
- Sukirno,S. 2008. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Edisi Ketujuh. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, M. P. 2004.Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Erlangga. Surabaya.
- Yahya. 1997. Peranan program Inpres Desa Tertinggal dalam pengentasan kemiskinan di Banda Aceh. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Widyasworiano, R. 2014. Pengaruh dari variabel tingkat pendidikan, kesehatan dan partisipasi angkatan kerja wanita terhadap tingkat kemiskinan diKabupaten Gresik Tahun 2008-2012. Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 2. No 3: 55-63